

Kajian Pemahaman dan Diskriminasi Perpajakan dalam Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa tentang Tax Evasion



Ramdlan Hadi^{1*}, Susan Afria², Damhuri³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Universitas Mataram, Indonesia

¹ ramdlanhadi56@gmail.com, ² susafria@gmail.com, ³ damhuri557@gmail.com

* Corresponding Author email: ramdlanhadi56@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemahaman dan diskriminasi perpajakan dalam membentuk persepsi mahasiswa mengenai tindakan penghindaran pajak (tax evasion). Pemahaman perpajakan mencerminkan tingkat pengetahuan mahasiswa tentang konsep, aturan, dan pentingnya pajak dalam pembangunan negara, sementara diskriminasi perpajakan mengacu pada ketidakadilan yang dirasakan dalam sistem perpajakan. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei yang melibatkan mahasiswa dari berbagai program studi di Indonesia sebagai responden. Data dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif dan inferensial untuk menentukan hubungan antara pemahaman, persepsi diskriminasi perpajakan, dan pandangan terhadap tax evasion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi cenderung mengurangi toleransi terhadap tax evasion, sedangkan persepsi diskriminasi perpajakan berpotensi meningkatkan justifikasi terhadap perilaku tersebut. Temuan ini menekankan pentingnya pendidikan perpajakan yang komprehensif dan transparansi dalam sistem perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan generasi muda. Penelitian ini berkontribusi pada literatur perpajakan dengan memberikan perspektif baru terkait faktor-faktor yang memengaruhi persepsi dan sikap terhadap tax evasion, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk pembuat keputusan.

Article History

Received 2025-03-12

Revised 2025-03-25

Accepted 2025-03-28

Keywords

Pemahaman
perpajakan,
diskriminasi
perpajakan, tax
evasion, persepsi
mahasiswa,
kepatuhan pajak

Copyright © 2025, The Author(s)

This is an open-access article under the CC-BY-SA license



1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional, termasuk di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dalam konteks ekonomi modern, peran pajak tidak hanya terbatas pada pengumpulan dana, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk mendorong keadilan sosial dan pemerataan ekonomi (Setiawan & Putri, 2021). Dengan demikian, keberhasilan sistem perpajakan sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak, yang menjadi tantangan besar di berbagai negara, termasuk Indonesia (Hidayat & Ramadhani, 2020).

Kepatuhan pajak adalah elemen krusial dalam memastikan penerimaan negara yang optimal. Namun, praktik penghindaran pajak (tax evasion) masih sering terjadi. Tax evasion merujuk pada tindakan ilegal yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajibannya dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Fenomena ini tidak hanya berdampak negatif pada penerimaan negara, tetapi juga dapat menciptakan ketidakadilan di masyarakat (Yuliani & Hartono, 2022). Ketidakadilan ini muncul karena beban pajak yang tidak terbagi secara merata, sehingga merugikan pihak yang taat pajak (Rahmawati, 2019).

Salah satu aspek penting yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak adalah pemahaman perpajakan. Pemahaman perpajakan mencakup pengetahuan individu mengenai aturan, konsep, dan manfaat pajak bagi negara dan masyarakat.

Pengetahuan ini tidak hanya menciptakan kesadaran akan kewajiban perpajakan, tetapi juga membangun pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pajak dalam mendukung pembangunan negara (Santoso & Wibowo, 2020). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa individu dengan pemahaman perpajakan yang baik cenderung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi (Putri & Nugroho, 2018).

Namun, di sisi lain, persepsi diskriminasi perpajakan juga memainkan peran signifikan dalam membentuk sikap wajib pajak. Persepsi diskriminasi ini timbul ketika individu merasa sistem perpajakan tidak adil, baik karena perbedaan perlakuan antar kelompok wajib pajak maupun kurangnya transparansi dalam pengelolaan pajak (Pratama & Haryono, 2021). Ketidakpercayaan ini dapat menimbulkan sikap resistensi terhadap kewajiban pajak dan meningkatkan toleransi terhadap praktik tax evasion (Fadilah & Kusuma, 2020).

Generasi muda, khususnya mahasiswa, menjadi kelompok yang sangat strategis dalam konteks ini. Sebagai calon wajib pajak di masa depan, mereka memiliki potensi besar untuk menciptakan budaya kepatuhan pajak (Rahayu & Dewi, 2021). Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana pemahaman mereka tentang perpajakan serta persepsi mereka terhadap diskriminasi perpajakan memengaruhi pandangan mereka terhadap tax evasion. Dengan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi persepsi mereka, pemerintah dan institusi pendidikan dapat merancang program pendidikan perpajakan yang lebih efektif (Sutanto, 2019).

Pendidikan perpajakan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mahasiswa tentang pentingnya pajak. Materi yang disampaikan harus mencakup penjelasan mengenai fungsi pajak, proses pengelolaan pajak, dan dampak negatif dari tax evasion terhadap perekonomian (Wulandari & Saputra, 2021). Selain itu, upaya untuk meningkatkan transparansi dalam sistem perpajakan juga sangat penting agar mahasiswa dapat memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap institusi perpajakan.

Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak telah dilakukan melalui berbagai program, seperti kampanye edukasi dan insentif kepatuhan. Namun, hasilnya belum sepenuhnya optimal, terutama di kalangan generasi muda. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam pendekatan yang digunakan, khususnya dalam menangani persepsi diskriminasi perpajakan yang dirasakan oleh masyarakat (Firdaus & Amalia, 2020). Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menggali faktor-faktor yang memengaruhi sikap generasi muda terhadap tax evasion.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara pemahaman perpajakan dan persepsi diskriminasi perpajakan terhadap pandangan mahasiswa mengenai tax evasion. Studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana kedua faktor tersebut memengaruhi persepsi mahasiswa, sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang relevan untuk meningkatkan kepatuhan pajak di masa depan (Hakim & Wijaya, 2022).

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini melibatkan pendekatan kuantitatif dengan survei sebagai instrumen utama pengumpulan data. Responden penelitian terdiri dari mahasiswa dari berbagai program studi di Indonesia. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif dan inferensial untuk mengetahui hubungan antara pemahaman perpajakan, persepsi diskriminasi perpajakan, dan pandangan terhadap tax evasion. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan literatur perpajakan.

Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan pemerintah, institusi pendidikan, dan pembuat kebijakan dapat lebih memahami peran strategis generasi muda dalam menciptakan budaya kepatuhan pajak. Selain itu, hasil ini juga dapat menjadi landasan untuk merancang program edukasi dan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi tax evasion serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei untuk mengkaji hubungan antara pemahaman perpajakan, persepsi diskriminasi perpajakan, dan pandangan mahasiswa terhadap tax evasion. Populasi penelitian adalah mahasiswa program sarjana dari berbagai universitas di Indonesia. Sampel diambil menggunakan teknik *stratified random sampling* untuk memastikan representasi yang merata berdasarkan program studi, tingkat pendidikan, dan wilayah geografis, dengan jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan margin of error sebesar 5%. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang terdiri dari tiga bagian utama: pemahaman perpajakan, persepsi diskriminasi perpajakan, dan persepsi terhadap tax evasion, masing-masing diukur menggunakan skala Likert 5 poin.

Sebelum digunakan, instrumen penelitian diuji validitas dan reliabilitasnya melalui uji *content validity* dan *construct validity*, serta koefisien Cronbach's Alpha untuk memastikan konsistensi internal. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan tingkat variabel penelitian, serta secara inferensial menggunakan uji regresi berganda untuk menguji hubungan antara variabel-variabel utama. Selain itu, variabel demografis seperti usia, jenis kelamin, program studi, dan tingkat pendidikan dianalisis sebagai variabel kontrol untuk meningkatkan validitas internal. Penelitian ini juga mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk pemberian informasi yang jelas kepada responden, memperoleh persetujuan melalui *informed consent*, dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Pendekatan ini dirancang untuk menghasilkan temuan yang valid, reliabel, dan relevan dalam konteks kajian perpajakan di kalangan mahasiswa.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Hasil Penelitian

Penelitian ini mengungkapkan temuan yang mendalam mengenai pemahaman perpajakan, persepsi diskriminasi perpajakan, dan pandangan mahasiswa terhadap tindakan penghindaran pajak (tax evasion). Survei yang dilakukan pada 300 mahasiswa dari berbagai program studi di Indonesia memberikan wawasan yang signifikan. Sebanyak 72% responden menunjukkan pemahaman yang baik mengenai konsep dasar perpajakan, seperti tujuan pajak, peran pajak dalam pembangunan negara, dan hak serta kewajiban wajib pajak. Namun, hanya 45% yang memahami secara lebih teknis tentang mekanisme pelaporan pajak, penghitungan pajak, serta prosedur pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar mahasiswa memahami fungsi dasar pajak, mereka masih kurang terpapar dengan aspek teknis yang esensial dalam sistem perpajakan.

b. Pemahaman Perpajakan

Pemahaman yang lebih dalam tentang sistem perpajakan memengaruhi persepsi mahasiswa terhadap keadilan dan transparansi dalam penerapan pajak. Dari hasil survei, terlihat bahwa mahasiswa dengan tingkat pemahaman yang lebih tinggi lebih cenderung memiliki sikap positif terhadap kewajiban perpajakan. Mereka menyadari

pentingnya pajak sebagai sumber utama pendanaan untuk pembangunan nasional. Namun, masih banyak mahasiswa yang merasa kebingungan dengan mekanisme penghitungan pajak dan prosedur administratif lainnya, yang berpotensi menurunkan kepatuhan mereka dalam membayar pajak di masa depan. Sebagai contoh, beberapa responden mengeluhkan kurangnya sosialisasi mengenai cara pengisian SPT secara tepat, yang bisa memengaruhi tingkat kepercayaan mereka terhadap sistem perpajakan.

c. Diskriminasi Perpajakan

Salah satu temuan yang menarik adalah persepsi diskriminasi dalam sistem perpajakan Indonesia. Sebanyak 68% mahasiswa merasa bahwa sistem perpajakan di Indonesia masih belum adil, terutama terkait dengan beban pajak yang lebih berat bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan kecil, dibandingkan dengan pengusaha besar atau korporasi multinasional. Persepsi ini dipicu oleh laporan-laporan mengenai penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan besar yang tidak dikenakan sanksi yang setimpal (Sikka & Pratama, 2023). Di sisi lain, individu atau usaha kecil sering kali dihukum dengan sanksi yang lebih keras. Ketidakadilan ini menciptakan rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan sistem perpajakan secara keseluruhan, yang dapat mempengaruhi sikap mereka terhadap kepatuhan pajak (Gunawan, 2022).

d. Ketidakpercayaan terhadap Pengelolaan Pajak

Sebanyak 60% responden juga mengungkapkan rasa skeptis terhadap pengelolaan dana yang dihimpun dari pajak. Mereka meragukan bahwa dana pajak digunakan secara transparan dan efisien untuk kepentingan publik. Beberapa mahasiswa menyatakan bahwa mereka sering mendengar kasus korupsi atau penyalahgunaan dana yang berasal dari pajak, yang memperburuk pandangan mereka terhadap sistem perpajakan. Hal ini memperkuat teori keadilan distributif, yang menyatakan bahwa ketidakadilan dalam distribusi manfaat dari sistem perpajakan dapat mempengaruhi sikap masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak. Ketidakpercayaan terhadap pengelolaan pajak mengarah pada penghindaran kewajiban pajak karena adanya anggapan bahwa uang yang dibayarkan tidak akan digunakan dengan benar.

e. Persepsi Mahasiswa terhadap Tax Evasion

Terkait dengan sikap terhadap penghindaran pajak (tax evasion), hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan yang baik berperan dalam mengurangi toleransi terhadap perilaku tersebut. Sebagian besar mahasiswa yang memiliki pemahaman baik mengenai kewajiban pajak (89%) menilai bahwa penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan, terlepas dari ketidakadilan yang ada dalam sistem. Mereka berpendapat bahwa penghindaran pajak merugikan negara dan masyarakat secara keseluruhan, karena dapat mengurangi sumber daya yang dibutuhkan untuk pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi perpajakan yang lebih mendalam dapat memperkuat nilai-nilai kepatuhan pajak di kalangan generasi muda.

f. Hubungan Antara Diskriminasi Perpajakan dan Tax Evasion

Namun, ditemukan bahwa mahasiswa yang merasakan diskriminasi dalam sistem perpajakan cenderung lebih toleran terhadap tax evasion. Sebanyak 54% mahasiswa yang merasa bahwa sistem perpajakan tidak adil, seperti ketimpangan dalam penerapan sanksi, menyatakan bahwa mereka bisa memahami jika seseorang melakukan penghindaran pajak sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap ketidakadilan sosial dan ekonomi dapat

mempengaruhi keputusan individu untuk melanggar peraturan perpajakan. Mereka melihat penghindaran pajak sebagai respons terhadap sistem yang mereka anggap tidak transparan dan tidak adil.

g. Peran Pendidikan Perpajakan dalam Membentuk Sikap

Pendidikan perpajakan yang lebih komprehensif di tingkat pendidikan tinggi bisa menjadi kunci dalam mengurangi toleransi terhadap tax evasion. Para mahasiswa yang memiliki pengetahuan lebih mendalam mengenai peraturan perpajakan dan dampak positif pajak bagi negara lebih cenderung untuk mendukung sistem perpajakan yang adil dan patuh terhadap kewajiban pajak. Oleh karena itu, penting bagi institusi pendidikan untuk memperkenalkan topik perpajakan dalam kurikulum, tidak hanya sebagai materi teoretis tetapi juga melalui praktek dan studi kasus yang mendalam. Penyuluhan tentang manfaat pajak dan cara-cara yang benar untuk memenuhi kewajiban perpajakan perlu disosialisasikan secara luas kepada masyarakat, terutama generasi muda.

h. Reformasi Sistem Perpajakan

Penelitian ini juga memberikan wawasan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk reformasi sistem perpajakan di Indonesia. Reformasi yang dimaksud tidak hanya sebatas pada perbaikan administrasi perpajakan, tetapi juga pada penciptaan sistem yang lebih transparan dan adil. Salah satu langkah penting adalah memperbaiki mekanisme pengawasan terhadap wajib pajak, terutama pengusaha besar yang sering kali menghindari kewajibannya melalui celah hukum atau praktik penghindaran pajak yang rumit. Selain itu, pemerintah harus lebih memperhatikan distribusi manfaat yang diperoleh dari pajak, memastikan bahwa dana pajak digunakan dengan bijaksana untuk kepentingan umum dan pembangunan infrastruktur yang merata.

i. Implikasi Kebijakan

Temuan dari penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pembuat kebijakan dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif. Pendidikan dan sosialisasi perpajakan harus menjadi bagian integral dari program pemerintah untuk meningkatkan kesadaran pajak di kalangan masyarakat. Selain itu, kebijakan yang mendorong transparansi dan keadilan dalam penerapan pajak, serta pengelolaan dana pajak yang akuntabel, dapat meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap sistem perpajakan. Pembuat kebijakan perlu mendengarkan suara masyarakat mengenai ketidakadilan yang ada dalam sistem perpajakan dan melakukan langkah-langkah yang lebih konkret untuk menanggulangi ketimpangan tersebut.

4. Kesimpulan

Secara keseluruhan, penelitian ini mengungkapkan bahwa pemahaman yang baik tentang perpajakan dapat mengurangi toleransi terhadap penghindaran pajak, sementara persepsi diskriminasi perpajakan dapat meningkatkan pembenaran terhadap tindakan tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada pendekatan yang holistik dalam memperbaiki sistem perpajakan, termasuk melalui pendidikan perpajakan yang lebih baik dan reformasi kebijakan yang mendalam. Upaya-upaya ini akan membantu membentuk sikap positif mahasiswa terhadap pajak dan mengurangi tingkat penghindaran pajak di masa depan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Fadilah, R., & Kusuma, H. (2020). Persepsi diskriminasi perpajakan dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 15(2), 112-125.
- Firdaus, A., & Amalia, S. (2020). Program edukasi perpajakan dan tingkat kepatuhan pajak generasi muda. *Jurnal Pajak Nasional*, 18(1), 56-67.
- Gunawan, A. (2022). *Keadilan Sistem Perpajakan dan Persepsi Masyarakat*. Jurnal Ekonomi dan Perpajakan, 45(3), 150-165.
- Hakim, T., & Wijaya, R. (2022). Faktor-faktor yang memengaruhi tax evasion di kalangan mahasiswa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 20(3), 345-360.
- Hidayat, S., & Ramadhani, D. (2020). Tax evasion: Analisis penyebab dan dampaknya pada penerimaan negara. *Jurnal Keuangan Publik*, 12(4), 78-91.
- Pratama, A., & Haryono, T. (2021). Persepsi masyarakat terhadap keadilan dalam sistem perpajakan. *Jurnal Sosial Ekonomi*, 9(3), 150-162.
- Putri, R., & Nugroho, S. (2018). Pemahaman perpajakan dan dampaknya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Terapan*, 6(2), 89-101.
- Rahayu, F., & Dewi, M. (2021). Pengaruh pendidikan perpajakan terhadap sikap generasi muda terhadap tax evasion. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 14(1), 45-58.
- Rahmawati, A. (2019). Ketidakadilan dalam sistem perpajakan dan pengaruhnya terhadap perilaku tax evasion. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 11(3), 203-215.
- Santoso, D., & Wibowo, L. (2020). Pentingnya pemahaman perpajakan bagi generasi muda. *Jurnal Pajak dan Keuangan*, 19(2), 132-147.
- Setiawan, B., & Putri, A. (2021). Peran pajak dalam pembangunan ekonomi nasional. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(4), 256-271.
- Sikka, M., & Pratama, R. (2023). *Dinamika Penghindaran Pajak oleh Korporasi Multinasional dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Masyarakat*. Jurnal Studi Perpajakan, 12(2), 201-218.
- Wulandari, I., & Saputra, J. (2021). Transparansi sistem perpajakan dan dampaknya pada kepercayaan wajib pajak. *Jurnal Administrasi Publik*, 22(2), 145-158.